
PERJUANGAN ARUNG SINGKANG DAN DOMINASI KOLONIALISME (1726-1765)

Ridwan¹, Meike Imbar², Yohanes Burdam³

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
Email: ridwangtm38@gmail.com, meikeimbar@unima.ac.id, yohanesburdam@unima.ac.id

Article History

Received : 2023-11-21 Accepted : 2023-11-22 Published : 2023-12-30

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi perjuangan Arung Singkang serta menganalisis bentuk dan dampak perjuangan Arung Singkang dalam membebaskan kerajaan Wajo dari kekuasaan VOC dan dominasi kerajaan Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah menurut Louis Gottschalk melalui empat tahap, yaitu *Pertama*, melakukan perumusan masalah dan observasi historis guna memperoleh sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. *Kedua*, melakukan kritik sejarah atau pengujian data informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. *Ketiga*, melakukan generalisasi atau kategorisasi data sesuai permasalahan, dan *Keempat*, melakukan pencarian (analisis) sebab-akibat dari masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Wajo mulai muncul sekitar 1399, nama kerajaan ini diambil dari nama sebuah pohon besar yaitu bajok. Di bawah pohon inilah, rakyat Boli mengadakan perjanjian dengan La Tenribali sebelum diangkat menjadi Batara Wajo I. Kemudian Boli dibentuk oleh 3 orang bangsawan yang kemudian mengangkat La Tenribali menjadi raja pada Kerajaan Wajo. *Kedua*, Faktor-faktor Arung Singkang melakukan perjuangan dalam melawan Kolonialisme disebabkan oleh jatuhnya kerajaan Wajo ketangan Belanda dan Bone yang membuat masyarakat Wajo menjadi sengsara. Belanda juga memonopoli perdagangan sehingga merugikan kerajaan Wajo. Selain itu, karena ada yang diyakini dalam nilai siri' na pacce. *Ketiga*, Bentuk perjuangan yang dilakukan Arung Singkang terhadap VOC adalah dengan menyatukan, dan mempersiapkan pasukan Wajo guna melakukan perlawanan, kemudian melakukan serangan terhadap VOC, Serangan ini digencarkan selama beberapa tahun. Arung Singkang akhirnya berhasil mengusir VOC dan Bone dari Wajo.

Kata kunci: *Perjuangan Arung Singkang, VOC-Bone, Kerajaan Wajo*

SINGKANG ARUNG STRUGGLE AND DOMINATION OF COLONIALISM (1726-1765)

Ridwan¹, Meike Imbar², Yohanes Burdam³

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
Email: ridwangtm38@gmail.com, meikeimbar@unima.ac.id, yohanesburdam@unima.ac.id

Abstract This research aims to describe the factors that influenced Arung Singkang's struggle and analyze the form and impact of Arung Singkang's struggle in liberating the Wajo kingdom from VOC rule and the dominance of the Bone kingdom. The research method used is the historical method according to Louis Gottschalk through four stages, namely first, carrying out problem formulation and historical observation in order to obtain sources related to the problem being studied. Second, carry out historical criticism or test information data obtained from various sources. Third, carry out generalization or categorization of data according to the problem, and Fourth, carry out a cause-and-effect search (analysis) of the problem being studied. From the results of this research it can be concluded that: first, Wajo began to appear around 1399, the name of this kingdom was taken from the name of a large tree, namely Bajok. Under this tree, the people of Boli entered into an agreement with La Tenribali before he was appointed Batara Wajo I. Then Boli was formed by 3 nobles who then appointed La Tenribali as king of the Wajo Kingdom. Second, the factors behind Arung

Singkang's struggle against colonialism were caused by the fall of the Wajo kingdom to the Dutch and Bone, which made the Wajo people miserable. The Dutch also monopolized trade to the detriment of the Wajo kingdom. Apart from that, because there is a belief in the value of siri' na pacce. Third, the form of struggle carried out by Arung Singkang against the VOC was by uniting and preparing the Wajo troops to carry out resistance, then carrying out attacks on the VOC. This attack was intensified for several years. Arung Singkang finally succeeded in expelling the VOC and Bone from Wajo.

Keywords: *Arung Singkang Struggle, VOC-Bone, Wajo Kingdom*

Pendahuluan

Wajo adalah sebuah Kabupaten dengan ibu kotanya Sengkang, yang terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 250 Km dari kota Makassar (ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan). Penamaan Wajo sendiri pada awalnya berasal dari nama sebuah pohon yaitu *Bajo*, *Bajo* sendiri berarti pohon yang besar, kokoh, daunnya rimbun dan teduh yang biasa disinggahi oleh para musafir atau pemburu untuk berteduh. Namun lama-kelamaan pengucapan *Bajo* berubah jadi Wajo yang berarti bayangan.

Kabupaten Wajo mempunyai 14 (empat belas) kecamatan, 48 kelurahan dan 128 desa serta memiliki luas wilayah 2.504,06 km persegi. Berdasarkan SP2020, jumlah penduduk Kabupaten Wajo September 2020 sebanyak 379.079 jiwa. Selain itu, Wajo juga mempunyai banyak warisan kebudayaan, tempat wisata dan beberapa tempat bersejarah.

Berbicara mengenai sejarah, dahulu Wajo adalah sebuah kerajaan Bugis bercorak Islam yang didirikan sekitaran tahun 1399. Wajo juga mempunyai tokoh-tokoh penting salah satunya yaitu La Maddukelleng atau lebih dikenal dengan nama Arung Singkang yang merupakan seorang tokoh pejuang serta Raja dari kerajaan Wajo dalam melawan kolonialisme VOC dan dominasi kerajaan Bone pada saat itu.

Arung Singkang (La Madukkelleng, 1700-1765) yang merupakan keturunan bangsawan Bugis dari Wajo, kembali ke Sulawesi pada tahun 1735 dan berhasil menguasai Wajo pada tahun 1737. Dia kemudian mengobarkan peperangan melawan VOC dan Bone yang berlangsung terus menerus hingga kematiannya.

Perjuangan yang dilakukan oleh Arung Singkang, berhasil membebaskan Wajo dari belenggu VOC dan dominasi kerajaan Bone serta berhasil memperluas daerah kekuasaan kerajaan Wajo.

Jika ditanyakan mengapa penulis mengambil Tokoh Arung Singkang sebagai bahan penelitian padahal banyak Tokoh-tokoh Pejuang lain yang lebih berpengaruh dan terkenal, misalnya Arung Palakka seorang Tokoh Pejuang dari Bone yang sangat banyak dikenal di Sulawesi Selatan terutama di Tanah kelahirannya Bone. Alasannya sedeharna! hal

ini dikarenakan kurangnya literasi mengenai Tokoh Arung Singkang tersebut. Padahal perjuangan beliau dalam memperjuangkan Tanah kelahirannya Wajo dari belenggu VOC dan dominasi Bone perlu diapresiasi. Perjuangan Arung Singkang tidak beda jauh dengan Tokoh-tokoh pejuang lainnya tetapi ada sedikit perbedaan dalam proses perjuangannya. Perjuangan Arung Singkang bisa dibilang agak lebih dramatis! yang dimana pada masa kecil Arung Singkang, beliau sudah harus meninggalkan Tanah kelahirannya dan pergi mengungsi di daerah asing. Sekembalinya ke Sulawesi pada tahun 1735 beliau sudah harus ikut terseret dalam peperangan yang berlangsung terus menerus sampai saat meninggalnya. Dalam proses perjuangannya, Arung Singkang banyak mengalami kegagalan dan kekalahan baik Eksternal maupun Internal akan tetapi beliau tetap teguh dalam proses perjuangannya dalam membebaskan Wajo dari belenggu VOC dan dominasi Bone sampai akhir hayatnya (M. C. Ricklefs 2008 : 138).

Dari uraian tersebut, penulis ingin meneliti bagaimana Perjuangan Arung Singkang dalam membebaskan Wajo dari belenggu VOC dan dominasi kerajaan Bone.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisa permasalahan penelitian yang ada yaitu dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut penulisan sejarah (Louis Gottschalk 1985: 32).

Adapun penggunaan empat tahap penelitian dengan metode sejarah dari Louis Gottschalk sebagai berikut:

- a. Heuristik
kegiatan mencari dan menemukan sumber sejarah berupa buku, dan hasil penelitian lainnya yang sudah diterbitkan tentang masalah Perjuangan Arung Singkang untuk membebaskan kerajaan Wajo dari kekuasaan VOC dan dominasi Kerajaan Bone.
- b. Kritik Sejarah

- kegiatan yang dilakukan secara internal dan eksternal terhadap sumber data yang dikumpulkan.
- c. Interpretasi
kegiatan pemaknaan data dari sumber informasi yang telah dipilih dan digunakan yang teruji kebenarannya.
 - d. Historiografi
kegiatan penulisan fakta yang berasal dari sumber sejarah yang terpilih sesuai masalah dengan penjelasan yang akurat (Louis Gottschalk, 1985 : 21-37).

Hasil dan Pembahasan GAMBARAN UMUM WAJO Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 23 Kabupaten dan 3 kotamadya yang di dalamnya terdapat empat (4) kelompok etnik terbesar di provinsi Sulawesi Selatan yaitu Suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Khusus etnik Bugis yang tergolong dalam suku-suku Melayu Deutero, masuk ke Nusantara setelah Gelombang imigrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Dalam dalam perkembangannya komunitas orang Bugis yang berasal dari kata "To Ugi", berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Selanjutnya mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri (Asmi, 2013 : 347).

Adapun beberapa kerajaan-kerajaan Bugis kalsik yang ada di Sulawesi Selatan antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, Sawitto, Sidenreng dan Rappang. Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, dan proses pernikahan mereka menyebabkan terjalannya hubungan pertalian sedarah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis terbagi dalam beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Barru, daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar yakni Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan. Sedang peralihan antara Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang.

Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang dianggap tertua bersama kerajaan Cina (yang

kelak menjadi Pammana), Mario (kelak menjadi bagian Soppeng), dan Siang (daerah di Pangkajene Kepulauan) (Asmi, 2013 : 347). Mereka mempunyai populasi yang jumlahnya diperkirakan sekitar 3 juta lebih, dan termasuk 600 ribu orang berapa di perantauan, yang menghuni separuh daratan dan perbukitan di bagian selatan. Ada juga sebagian kecil yang tinggal di daratan Luwu, di sekitar pantai dan sebelah selatan Palopo (Zuhro, dkk., 2009 : 141).

Ditinjau dari segi bahasa dan budaya, keempat suku ini mempunyai ciri khas tersendiri masing-masing. Begitupun dengan dialeknya, masing-masing berbeda satu sama lain tergantung dari sub-sub etniknya. Adapun dari segi 509 bahasa maupun budaya, hampir semua suku-suku di Sulawesi Selatan mempunyai hubungan satu sama lain. Bahkan orang Bugis yang berdomisili di wilayah bagian tengah, mereka saling berinteraksi dengan suku-suku yang berdomisili di wilayah Kota Makassar. Dari segi agama, budaya, serta bahasa, orang Makassar dengan orang Bugis memiliki kesamaan sehingga kedua etnik berbeda ini mendapat julukan sebagai orang "Bugis Makassar".

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh orang Bugis, dan termasuk kedalam 23 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di bagian tengah. Memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3°39'-4° LS dan 119°53'-120°27'BT. Luas wilayah sekitar 2.506.19 Km² atau 4,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Memiliki batas-batas wilayah yang dimulai dari sebelah Utara yaitu; Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap, kemudian sebelah selatan meliputi Kabupaten Bone dan Soppeng, lalu sebelah Timur Teluk Bone, dan yang sebelah Barat adalah Kabupaten Soppeng dan Sidrap. Dengan luas Wilayah tersebut di atas, Kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 kecamatan, 48 Kelurahan, dan 128 Desa (BPS Kabupaten Wajo, 2015 : 5).

Untuk sekarang mayoritas masyarakat Wajo bergerak di bidang pertanian. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam, dan tersedianya cukup lahan bagi pengembangan usaha

pertanian, sehingga Kabupaten Wajo terkenal sebagai salah satu sentra penghasil beras di Sulawesi Selatan. Selain bergerak di bidang pertanian, penduduk Wajo juga bergerak di bidang penangkapan ikan (nelayan), serta juga terkenal sebagai suku bangsa yang cekatan dalam bidang niaga (wiraswasta). Dan sebagian lagi ada yang menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Karakter orang-orang Wajo dahulu kala sebagaimana yang digambarkan oleh Matthes, yaitu “Pada 1670 Arung Palakka dan sekutu-sekutunya menghancurkan Tosora yang ketika itu merupakan pusat Kerajaan Wajo, yang mengakibatkan banyak orang-orang Wajo yang pergi meninggalkan negeri mereka dan memutuskan untuk memulai perdagangan dan melakukan pelayaran ke berbagai pulau, baik di dalam maupun di luar Nusantara. Sekalipun apa yang dikatakan oleh Matthes tidak seluruhnya benar, namun tidak dapat disangkal, bahwa orang-orang Wajo adalah *Entrepreneurs* yang ulet di bidang niaga” (Abidin, 1985 : 8).

Terbentuknya Politik Awal

Pada masa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, konsep awak kenegaraan berbasis pada konsep *toamanurung* (Bugis), *tumanurung* (Makassar). Konsep ini pada dasarnya menampakkan gagasan integralis. Konsepsi *toamanurung* telah memberikan petunjuk yang jelas tentang pembentukan satu kerajaan di Sulawesi Selatan dan merupakan cikal bakal adanya kerajaan di Sulawesi Selatan (Hafid, 2011 : 142). *Tomanurung* yang diartikan sebagai orang asing akan tetapi diterima menjadi pemimpi mereka dipandang yang terbaik dan layak untuk jabatan itu. Tokoh itu hadir tanpa diketahui dari mana asalnya, siapa namanya namun mampu menentramkan unit-unit politik yang pada masa itu sering bersengketa dan berperang sehingga ditokohkan (Poelinggomang, 2003 : 2).

Memang sangat menarik cerita *toamanurung* ini sebab ia mampu mewujudkan suatu integrasi dari berbagai kesatuan hidup yang kecil (*kesatuan anang*), lalu membentuk satu kesatuan hidup yang lebih besar yang kemudian dinamakan kerajaan. Hampir semua kerajaan yang ada di daerah Sulawesi Selatan

pada dasarnya terbentuk dari beberapa buah kerajaan kecil yang mengintegrasikan diri dan bersatu membentuk suatu kerajaan besar seperti; Kerajaan Bone, Kerajaan Makassar (Gowa-Tallo), Kerajaan Luwu. Bentuk yang sama juga terjadi pada Kerajaan Wajo yang mengintegrasikan 40 buah wilayah *matoa*. Sikap integralis ini juga mendasari pola hubungan politik dan kultural yang terjadi sehingga kerajaan-kerajaan yang terbentuk ketika itu dalam perkembangannya mempunyai hubungan erat antara satu dengan lainnya.

Berbeda halnya dengan Kerajaan Wajo yang tidak mengenal *toamanurung*, seperti kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai versi yang menceritakan berdirinya kerajaan ini, salah satunya dimulai ketika kedatangan seseorang yang tidak dikenal namanya. Orang ini datang bersama pengikutnya dan menetap di tepi danau bernama Lampulung. Mereka berasal dari sebelah barat gunung di pinggir laut. Dan akhirnya pemimpin keluarga itu lalu diberi nama “*Puang ri Lampulungeng*”. Daerah ini sangat subur, sehingga lama kelamaan banyak kelompok keluarga lain berdatangan ke sana, sehingga perkampungan ini semakin sempit. Akhirnya *Puang Lampulungeng* menyarankan agar sebagian penduduk pindah ke tempat lain. Dan tempat itu kemudian diberi nama *Penrang*, sementara tempat tinggal *Puang Lampulungeng* bernama Saebawi. Nama itu diambil sesuai dengan kebiasaannya mengendarai seekor babi raksasa. Sebagian lagi membentuk wilayah baru yang diberi nama *Sarinyameng*. Nama itu sesuai dengan kebiasaan sebagian penduduk yang melakukan pekerjaan membuat tuak untuk diminum. Menyadap *tuak* (sari), dan *nyaman* diminum maka menjadilah nama itu *sarinyameng*.

Ketiga kampung itu penduduknya hidup rukun dan damai, serta makmur. Tetapi ketika *Puang ri Lampulungeng* wafat, maka pengikutnya menjadi terpecah dan kacau balau. Setelah itu, muncul lagi seseorang yang pekerjaannya sebagai tukang ramal yang tinggal di dekat pohon besar (orang menyebutnya pohon *bajo*). Orang ini juga memperkenalkan kebiasaan minum tuak yang dicampur dengan *tekikanbajo* yang

menjadikannya lebih enak diminum (*tuak ri boli*). Akhirnya kampung itu diberi nama Boli, dan pemimpinnya diberi gelar *Puangnge ri Timpengeng*.

Sebelum meninggal, *Puang ri Timpengeng* kedatangan seorang tamu dari daerah Luwu yang bernama *Opu Balirante*, dan tempat kedatangannya disebut "*Cinnottabangka*". Tujuan kedatangan yang sebenarnya adalah untuk menagih pajak pertanian (*widattali*=1/3 dari hasil panen). Tetapi ketika terjadi dialog antara kedua belah pihak, *Puang ri Timpengeng* ditanya tentang asal usulnya. Ia mengatakan 511 bahwa, ia dan pengikutnya adalah orang *Boli*, lahir dan besar disini. Dan tidak berasal dari Gunung Latimojong dan Bawakaraeng, dan rumahnya beratap daun nipa. Jawaban itulah yang menyebabkan "*Boli*" terbebas dari pajak atau *widattali* (Abidin, 1999: 117-118). *Puang ri Timpengeng* mulai memperkenalkan pranata musyawarah yang dinamakan *assipatangngareng*. Beliau juga mengajarkan bahwa orang-orang *Boli* adalah orang-orang merdeka sejak berada dalam kandungan ibu mereka. Pernyataan itu pula yang menyebabkan daerah ini mengalami gangguan terus menerus dari kerajaan tetangga, sehingga memaksa penduduknya pindah mencari daerah atau tempat lain.

Sementara itu, *La Paukke* di Luwu datang berburu rusa dan babi yang disertai pengikutnya, dan memilih *Cinnotabbbi* untuk mendirikan perkampungan, sebab tanahnya subur. Oleh para pengikutnya lalu mengangkat beliau sebagai raja *Cinnotabbbi* yang pertama. Meski telah mengangkatnya sebagai pemimpin mereka, namun belum ada perjanjian yang dibuat antara rakyat dan pemimpinnya. Perjanjian atau kontrak, barulah dibuat oleh rakyat pada masa pemerintahan raja *Cinnotabbbi III* yang bernama *We Tenrisui* yang bersuamikan *La Rajalangi* seorang putra *Datu Babauae* dari *Bone*. Kontrak pemerintahan itu berbunyi sebagai berikut: "*Salipuri temmacekkeng puang; Dongiri temmatippakkeng, Tanrereakkeng asalakkeng; Mualaki Atongengkekkeng Asseriakkeng abiasakkeng*" Artinya: "*Selimutilah kami tuanku, supaya kami tidak kedinginan, jauhkanlah kami dari bahaya dan*

kesukarankesukaran; lindungilah kami dari gangguan burungburung pipit supaya tanaman padi kami tidak hampa; sanggahlah kami dalam kesalahan-kesalahan kami; ambilkah kami kebenaran kami; kuatkanlah untuk kami kebiasaan kami"(Patunru, 1983:24-25).

Kata-kata yang diucapkan oleh *matoa*, dijawab langsung oleh *La Rajalangi* selaku wakil raja. Setelah itu dibentuklah aturan mengenai bagaimana bertingkah laku dalam bermasyarakat dan bernegara. Setelah *We Tenrisui* mangkat, tahta pemerintahan dipegang oleh *La Patiroi* sebagai *Arung Cinnotabi IV*. Ketika *La Patiroi* mangkat, rakyat menunjuk dua orang anaknya sekaligus untuk memerintah (*La Tenribali* dan *La Tenritippe*). Dalam perjalanannya, keduanya berselisih paham. Akibat dari perselisihan ini membuat tiga bangsawan daerah ini (sepunya sendiri yaitu *La Tenritau*, *La Tenripekka*, dan *La Matareng*) disertai para pengikutnya pindah ke daerah *Boli* dan membangun tiga perkampungan di sana. *La Tenritau* memberi nama negerinya *Majauleng*, *La Tenripekka* memberi nama daerahnya *Sabbamparu*, dan *La Matareng* memberi nama negerinya *Takkalala*. Dan ketiga orang tersebut menjadi pemimpin dinegerinya masing-masing. Dengan demikian, *Boliterbagi* menjadi tiga *limpo* atau disebut *Lipu Tellu Kajurue'* (negeri yang berserikat yang terdiri dari tiga daerah bagian bagaikan buah kemiri), tetapi ada juga yang menamainya "*Telluturungeng Lakka'e* yang diibaratkan tiga raja yang sedang duduk bersama-sama (Abidin, 1985 : 74; Arsip, 2007 : 236). Setelah tiga tahun lamanya *La Tenribali* dan *La Tenritippe* berada di *Penrang* lalu berhasil mendirikan Kerajaan *Penrang* dan membuka lahan pertanian (sawah dan ladang), maka *La Tenritau*, *La Tenripekka* dan *La Matareng* mengadakan suatu musyawarah. Musyawarah dihadiri oleh semua penduduk dan tokoh masyarakat *Boli* untuk membicarakan tentang masalah kepemimpinan negeri *lipu tellu kajurue*. Ketiga pemimpin wilayah itu setuju mengangkat *La Tenribali* menjadi raja mereka dengan sebutan *Arung Mataesso*. *La Tenribali* akhirnya menyetujui permintaan itu, tetapi ia meminta beberapa persyaratan menyangkut aturan-aturan yang

akan dipakai selama pemerintahannya nanti. Ketiga kepala *limpo* menyetujui permintaan itu, dan iapun melepas gelarnya sebagai raja Penrang dan menyebut dirinya Paddanreng (anggota DPR Pusat). Walau ia sebagai *Paddanreng*, akan tetapi dia tetap sebagai kepala *limpo* di daerahnya masing-masing. Di kemudian hari, ketiga *limpo* itu juga diubah namanya yaitu Majauleng berubah menjadi Bettempola, Sabbangparu berubah menjadi Talotenreng, dan Takkalalla berubah menjadi Tuwa (Abidin, 1999 : 124).

Persyaratan yang diminta La Tenribali sebelum melaksanakan amanah untuk mengayomi rakyat Boli adalah menetapkan hubungan antara raja dan para kepala *limpo*, hubungan hak dan kewajiban antara raja dan *matoa*, menetapkan pula bahwa semua hukum adat yang telah ditetapkan di Cinnotabik diberlakukan, termasuk hak-hak asasi manusia. Beliau juga mengusulkan agar *ada' pura onro* (hukum adat yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan ternyata dalam praktek terbukti telah bermanfaat bagi seluruh rakyat), diakui sebagai hukum yang tak boleh diubah lagi. Sedangkan *ada' assimemangenna wanue* (hukum adat yang telah dibentuk oleh pemerintah, tetapi lahir dan berkembang di antara rakyat, juga harus dihormati. Diusulkan juga agar dibentuk pada tingkat daerah dan pusat *ada' assamaturuseng*, yaitu hukum adat yang lahir dari hasil *assipatangngareng* (musyawarah), antara pejabat-pejabat kerajaan dan wakil rakyat (para *matoa* dan *ulu anang*) (Abidin, 1999:124). Hukum adat seperti ini setiap saat dapat diubah berdasarkan kehendak bersama pemerintah yang diperintah, jika ternyata tidak bermanfaat dan merugikan rakyat.

Setelah semuanya menyetujui usul La Tenribali tersebut, maka para kepala *limpo* dan para *matoa*, segera melakukan perjanjian antara calon *Arung Mataesso* La Tenribali dan rakyat ketiga *limpo*. Sebelum janji diucapkan, ketiga orang *arung* atau kepala *limpo* dengan suka rela melepas gelarnya masing-masing dan menyatakan diri sebagai *paddanreng* dan anggota Dewan Pemerintah Pusat. Meskipun para *kepala limpo* telah menanggalkan jabatannya, tetapi ia tetap menjabat sebagai kepala *limpo* di wilayahnya masing-masing. Perjanjian antara La Tenribali dan rakyat Boli

dari ketiga *limpo*, diadakan di bawah sebatang pohon besar yang tinggi dan batangnya lurus serta daunnya rindang, rakyat menyebut pohon tersebut dengan nama pohon *bajo*.

Sesudah dilantik, La Tenribali lalu mengucapkan sumpah dan janji dan seluruh hadirin yang hadir secara bersama-sama berteriak menyatakan persetujuannya. Sesudah upacara pelantikan, La Tenribali diberi gelar *Batara Wajo* sesuai dengan bunyi janji yang diucapkan yang berbunyi "Batarae manituri menekna jancitta, tanaemani ri awana". Artinya hanya langit (*batara*) yang berada di atas janji kita, dan tanah yang ada di bawahnya. Oleh karena langit atau *batara* merupakan perlambang keagungan dan pohon *bajo* yang batangnya lurus dan rindang daunnya untuk tempat bernaung memberikan *wajo-wajo* (bayang-bayang) yang menyejukkan bagi orang-orang yang berteduh di bawahnya. Negeri Boli diibaratkan bagaikan pohon pengayom bagi rakyatnya, sehingga La Tenribali *Batara Wajo I* serta para *paddanreng* sepakat mengubah nama Boli menjadi *Wajo* (Abidin, 1999:126), sejak itulah Kerajaan *Wajo* berdiri.

Bentuk dan Srtuktur Pemerintahan

Sebelum Kerajaan *Wajo* berubah dalam bentuk kerajaan demokratis, kerajaan ini pernah menganut sistem pemerintahan *monarki absolut* yang terjadi pada masa kerajaan ini dipimpin oleh raja Cinnotabi I sampai III. Dan pada masa pemerintahan raja IV ini, bentuk pemerintahan itu masih belum ditinggalkan (pemerintahan kebataran). Dua masa pemerintahan itu dinilai oleh rakyat sebagai masa yang tidak efektif, sebab sering menyebabkan ketidakadilan pada rakyat. Penyebabnya adalah sikap otoriter raja dan termasuk ketidakcakapannya dalam menjalankan pemerintahan.

Sejak Kerajaan *Wajo* memasuki masa *arungmatoa*, maka sistem *monarki absolut* bergeser ke arah yang lebih baik. Raja tidak lagi dipilih dan ditentukan berdasarkan keturunan, melainkan dipilih oleh rakyat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang pemimpin yang baik harus merupakan calon pilihan yang memiliki kemampuan di samping syarat-syarat lainnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perjanjian dengan raja terpilih,

yang berisikan penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Perjanjian itu dilakukan oleh ketua kelompok kaum (tiga *limpo*) yaitu Bettempola, Talotenreng, dan Tuwa yang disebut *paddanreng* atau *ranreng*.

Arung Matoa Wajo dalam menjalankan pemerintahannya, didampingi oleh tiga orang pejabat tinggi yang disebut *paddanreng* atau *ranreng*. *Paddanreng* ini merupakan wakil dari tiga *limpo* yang menggambarkan tentang mata pencaharian penduduk *limponya* (Talotenreng untuk penyadap *tuak/enu*; Bettempola untuk pertanian dan Tuwa untuk wakil nelayan) (Zuhro, dkk., 2009: 145). *Paddanreng* dalam menjalankan tugasnya, didampingi oleh para panglima perang masing-masing *limpo*-nya. Bettempola panglima perangnya dinamakan *filla* yang berwarna merah, sedang Talotenreng didampingi panglima perangnya bernama *Patola* (pemegang bendera warna-warni), dan Tuwa didampingi oleh panglima perang pemegang bendera *Cakkuridi* atau bendera warna kuning (Wolhoff, 1947:178). Ketiga pemegang panji tersebut, juga merupakan pejabat tinggi yang disebut *Pabbate/Bate Lompo*. Tugas awalnya adalah menyangkut keamanan dan peperangan di wilayah masing-masing (Patunru, 1983:13-14).

Ketiga jabatan itu (*paddanreng* dan *pabbate*) bersama membentuk dewan yang disebut *Arung Petta Ennengnge* (dewan eksekutif). Jika *Arung Matoa* Wajo hadir dalam dewan persidangan, maka dewan itu disebut *Petta Wajo*. Setingkat lagi dibawahnya, terdapat aparat/lembaga yang dinamakan *Arung Mabbicara*, yang terdiri atas 30 pejabat yang bertugas memberikan nasehat dan mengadili perkara-perkara. Setiap *paddanreng* didampingi oleh 10 orang *arung mabbicara*, yang bertugas untuk menaikkan *bicara*, dan diteruskan kepada pengadilan untuk diputuskan. Selain itu, *paddanreng* juga didampingi oleh masing-masing satu *suro ri bateng* (duta resmi). Keseluruhan pejabat itu yang disebut lembaga atau Badan Pemerintahan Tertinggi atau disebut juga *Arung Pattappulo* (raja-raja 40) atau biasa pula disebut mereka *Puang ri Wajo* yang "Paoppang Palengengngi Wajo" artinya mereka itulah

yang menelungkupkan dan menengadahkan Tanah Wajo (Wolhoff, 1947:178).

Pejabat lebih rendah lagi, adalah Punggawa sebanyak 3 orang (masing-masing satu untuk *paddanreng*), sebelumnya digelar *matoa* yang mengepalai setiap *limpo* (Majauleng, Sabbangparu, Takkalalla). Pejabat ini sering pula disebut *Inanna Tau Megae* (ibu dari orang banyak). Mereka ini menjalankan pemerintahan langsung atas rakyat dalam wilayahnya masing-masing dan menjadi penghubung antara *Petta Wajo* dengan *Arung Lili* (daerah bawahan) di seluruh Kerajaan Wajo. Atau jika ada permufakatan dan keputusan dari *Petta Wajo*, dialah yang meneruskan kepada *Arung Lili*. Semua permasalahan yang dihadapi *Arung Lili* harus berjenjang hingga *Arung Matoa*, terakhir secara bersama dengan *Arung Patappulo* (*Arung Empat puluh*) (Patunru, 1983:15).

Sejak terbentuknya Kerajaan Wajo dengan raja pertamanya yang bernama La Palewo Topalipung, anak dari La Tenri Peppang *Ranreng Talotenreng* yang memerintah 1480- 1488, maka gelar rajanya berubah menjadi *Arung Matoa* dan bukan lagi *Batara Wajo*. Pada masa pemerintahan *Arung Matoa Wajo II La Obbi Settiriware* (1488-1493), mulailah disusun struktur pemerintahan seperti yang disebut di atas. Struktur itu meliputi; *Arung Ennangnge* dan *Arung Patappulo* yang juga digelar *Puang Ri Wajo*. *Arung Ennengnge* terdiri atas 3 orang *ranreng* dan 3 orang *bate lompo*. Sementara yang disebut *Arung Patappulo* adalah pejabat kerajaan yang terdiri atas 40 orang pejabat yang meliputi; 1 orang *Arung Matoa*, 3 orang *ranreng*, 3 orang *batelompo* dan 3 orang *suro ri bateng* serta 30 orang *pabbicara*, itulah yang disebut *Arung Patappulo* atau *Arung Ri Wajo* (Hadimuljono, dkk., 1985: 21).

FAKTOR-FAKTOR PERJUANGAN ARUNG SINGKANG

Faktor Ekonomi

Berdasarkan pada temuan data keramik asing, menunjukkan bahwa Tosora telah menjadi tempat yang sangat penting pada abad ke-14, karena penggunaan keramik dari jaman tersebut masih sangat terbatas pada kalangan tertentu seperti para bangsawan yang

menguasai perdagangan. Dari data keramik tersebut, kemudian diketahui pula bahwa Tosora semakin berkembang terus pada masa-masa selanjutnya dan mencapai puncaknya pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Perkembangan tersebut disebabkan pemilihan Tosora sebagai pusat dan sekaligus sebagai kota kerajaan sekitar abad ke-16 dan kemudian menjadi pusat penyebaran dan perkembangan Islam sejak awal abad ke-17 di wilayah Kerajaan Wajo (Akin Duli, 2010 : 153).

Tosora sebagai pusat dan ibu kota Kerajaan Wajo, merupakan salah satu bandar perdagangan yang terkenal di Sulawesi Selatan pada masanya. Temuan keramik asing menunjukkan bahwa banyak bangsa asing yang datang berdagang di kota tersebut, atau paling tidak telah mengadakan hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini didukung oleh letak geografis Tosora yang strategis, yaitu berada di pinggir danau atau tepi Sungai Walannae pada masa tersebut yang dapat difungsikan sebagai pelabuhan dan jalur lalu lintas pelayaran ke Teluk Bone. Tosora sebagai kota berfungsi sebagai pusat distribusi barang, terutama barang-barang impor yang dibawah oleh para pedagang yang datang lewat jalur pelayaran seperti keramik, pakaian, dan alat-alat senjata, dan sebagai pusat pemasaran barang-barang untuk ekspor seperti beras dan hasil-hasil alam lainnya yang diperoleh dari daerah sekitar atau dari daerah pedalaman. Dengan demikian, Tosora dapat berperan sebagai pasar yang mempunyai akses ke perdagangan maritim yang bersifat regional dan internasional dengan para pedagang lokal yang agraris (Akin Duli, 2010 : 153).

Secara teoritis, perdagangan merupakan salah satu ciri dari perkembangan dan kemajuan kehidupan suatu komunitas. Di Sulawesi Selatan, perdagangan telah dikenal sejak masa prasejarah, terutama perdagangan antar pulau dengan mempergunakan perahu bercadik. Perdagangan maritim tersebut, kemudian semakin berkembang pesat pada abad XV dengan berdirinya kerajaan- kerajaan maritim yang kuat. Pedagang- pedagang asing dari Asia seperti India, Cina, dan Siam, telah mengunjungi beberapa bandar di Nusantara, dan kemudian perdagangan maritim tersebut semaki ramai dengan masuknya para pedagang muslim dan Eropa. Akibat dari ramainya

perdagangan tersebut, maka muncullah kota-kota pelabuhan yang bersifat internasional. Peran Tosora sebagai pusat perdagangan pada masa lampau, selain didukung oleh letak geografis yang strategis, didukung pula oleh bukti-bukti arkeologis, seperti keramik asing, bangunan-bangunan yang secara fungsional erat kaitannya dengan perdagangan seperti geddong, gedung bunga, dan pelabuhan. Sisa-sisa bangunan tersebut dan bangunan-bangunan lainnya yang secara fungsional mendukung peran Tosora dalam berbagai aspek sebagai suatu kota, seperti aspek ekonomi (perdagangan dan pertanian), pemerintahan, pertahanan, dan keagamaan, kesemuanya itu merupakan bukti sisa-sisa dari masa kejayaan Kerajaan Wajo (Akin Duli, 2010 : 153).

Faktor Politik

Dengan daerah kekuasaannya yang luas menjadikan Kerajaan Wajo sebagai kerajaan terkuat kedua setelah Bone. Wajo pernah bersekutu dengan Kerajaan Luwu dan bersatu dengan Kerajaan Bone dan Kerajaan Soppeng dalam Perjanjian *Tallumpoccoe* pada tahun 1582. Kerajaan Wajo juga mendapatkan tawaran dari Sultan Alauddin untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi, karena trauma terhadap kerajaan Gowa yang menjadikan kerajaan Wajo sebagai kerajaan bawahan dan memperhatikan kesetiaan kawanan terhadap perjanjian *Tallumpoccoe* yang mempersaudarakannya dengan kerajaan Bone dan Soppeng membuat kerajaan Wajo tidak mau menerima ajakan tersebut dan menolak kerajaan Gowa.

Serangan Kerajaan Gowa-Tallo terhadap Kerajaan Wajo bukan karena Kerajaan Wajo menolak menganut agama Islam, melainkan dikarenakan Kerajaan Wajo menggabungkan dirinya ke dalam persekutuan *Tallumpoccoe*. Hal inilah yang menyebabkan Kerajaan Gowa-Tallo geram dengan Kerajaan Wajo (Sianipar, 2020 : 271). Sebelum bergabung dalam perjanjian *Tallumpoccoe* kerajaan Wajo merupakan bagian dari Kerajaan Gowa. Kemudian pada masa raja *Tunijallo* Kerajaan Wajo sudah di angkat dari Kerajaan budak menjadi sekutu Kerajaan Gowa, tetapi karena bujukan Kerajaan Bone, serta masih merasa terancam dengan statusnya

di kerajaan Gowa menyebabkan kerajaan Wajo memilih ikut dalam perjanjian Tallumpocoe dan bersaudara dengan kerajaan Bugis lainnya.

Pada tahun 1601 kerajaan Gowa telah mengirim utusan ke Kerajaan Wajo yang pada saat itu dipimpin Arung Matoa Wajo ke-11 (La Mungkace Toudamang). Akan tetapi, beliau belum bersedia memeluk Islam hingga akhir hayatnya (Bs. Kasmiyah, 1988 : 35). Diketahui juga salah satu alasan raja La Mungkace Toudamang belum bersedia menerima ajakan dari Kerajaan Gowa-Tallo, ialah karena perlakuan dari Kerajaan Gowa sebelumnya yang pernah memerintahkannya pergi ke gunung Barru kemudian mengangkut tiang-tiang kayu kepinggir laut untuk mendirikan istana Tamalate di Ibu kota Kerajaan Gowa. Perintah tersebut dianggap sangat keterlaluhan dan memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dengan dibantu oleh kerajaan Bone dan Soppeng melawan kerajaan Gowa.

Akibat dari pengalaman tersebut, Arung Matoa Wajo XI mempertimbangkan ajakan baik dari Kerajaan Gowa untuk memeluk agama Islam. Sepeninggalan Arung Matoa Wajo XI, ia digantikan oleh La Sangkuru Patau pada tahun 1607 M. Kemudian, karena melalui ajakan baik-baik tidak berhasil terhadap kerajaan Wajo maka Sultan Alauddin memutuskan untuk menyerang kerajaan Wajo dan mendarat di Akatongeng yang merupakan kerajaan terdekat dari wilayah Wajo. Kedatangan Sultan Alauddin dan pasukannya di sambut hangat oleh Kerajaan Akatongeng dan menerima ajakan memeluk agama Islam diikuti dengan kerajaan kecil di sekitarnya. Sebelumnya kerajaan Wajo dan Akatongeng memiliki hubungan yang erat, sehingga membuat perjanjian untuk saling mendukung. Keberpihakan Kerajaan Akatongeng didengar oleh Arung Matoa Wajo, sehingga Kerajaan Wajo mengirim utusan untuk menyampaikan pesan mengenai perjanjian mereka. Akan tetapi tanggapan Kerajaan Akatongeng dalam menanggapi pesan tersebut, beliau berkata, “tetapku ingat perjanjian yangkusepakati barsama Wajo, tetapi sudah kehendak dewata tunggal bahwa kali ini saya harus terpaksa berpisah, karena sudah ditunjukkan kepadanya dan kepada Wajo jalan yang benar akan tetapi

dia enggan menjalaninya” (Bs. Kasmiyah, 1988 : 36). Kemudian utusan dari Kerajaan Wajo memberi kabar kepada Arung Matoa Wajo tentang sikap yang diambil oleh Kerajaan Akatongeng dan Kerajaan kecil disekitarnya.

Sehingga kerajaan Wajo beserta Kerajaan *Tallumpocoe* mengepung Kerajaan Gowa yang singgah di Akatongeng dan memukul mundur Kerajaan Gowa. Setelah enam bulan berlalu, kerajaan Wajo dan Gowa sepakat melakukan gencatan senjata dengan waktu lima malam (H. Ahmad M. Sewang, 2013 : 122). Kerajaan Gowa mulai kembali memerangi Kerajaan Wajo dengan membawa pasukan dari kerajaan-kerajaan lainnya. Pasukan yang lebih besar menyebrang ke Parepare untuk menyerang Kerajaan Wajo selama lima malam, sehingga Kerajaan Wajo dapat ditaklukan dengan perjanjian yang di sepakati bersama Kerajaan Gowa. Alasan dari kekalahan Wajo ialah selain karena Kerajaan Soppeng ikut membantu Kerajaan Gowa, Kerajaan Lima Ajatappareng juga ikut adil dalam peperangan yang mendesak dan membuat Kerajaan Wajo mengaku kalah.

Setelah dinyatakan kalah Kerajaan Wajo ikut memeluk Islam, Arung Matoa Wajo mengirim beberapa orang untuk menyampaikan pesan bahwasannya “Kerajaan Wajo Bersedia menerima dan memeluk Islam dan meminta agar pemerintahan Wajo tidak ditaklukan negerinya, tidak dirampas barangnya dan tidak di berhentikan dari jabatannya sebagai raja”. Permintaan Arung Matoa Wajo diterima oleh raja Gowa, lalu pergi ke Wajo untuk memenuhi undangannya (H. Ahmad M. Sewang, 2013 : 122).

Akibat dikalahkan oleh kerajaan Gowa berkali-kali dan diberi syarat-syarat yang agak lunak, Karaeng Matoaya membuat Addatuang Sidenreng Lapatiroi, Arung Belawa Lamonggopeng Toanggiling, Arung Gilireng La Wawo menyatakan memeluk Islam sebagai keyakinan mereka pada tahun 1610M (Bs. Kasmiyah, 1988 : 36). Setelah mengikrarkan ke Islam, Karaeng Matoaya menghadiahkan Arung Matoa Wajo seperangkat alat salat yang sesuai syariat Islam dan bersama-sama mengadakan pesta ke Islaman. Kemudian setelah memeluk Islam Arung Matoajuga mendapatkan gelar “Sultan

Abdurrahman". Kekalahan Kerajaan Wajo inilah yang membuat kerajaan Bone semakin terpojok karena setelah ditaklukan Kerajaan Wajo ikut adil dalam peperangan dan mengingkari perjanjian Tallumpocoe, serta menjadi pasukan gabungan dari Kerajaan Gowa.

Setelah Bone untuk kesekian kalinya dapat ditundukkan lagi dan Sulawesi Selatan di bawah hagemoni Goa dapat dipasifikasikan, perhatian Goa diarahkan kepada lawan utamanya, ialah VOC. Ada beberapa faktor politik yang tidak menguntungkan Goa, salah satunya yaitu kontingen pengungsi Bugis di Batavia yang di bawah pimpinan Arung Palakka dan diberikan tempat pemukiman di dekat sungai Angke, maka mereka disebut Toangke. Mereka di di berikan pelatihan berperang dengan disiplin dan keras sebagai pasukan siap tempur (Sartono Kartodirdjo, 2014 : 115).

Perang besar-besaran antara kerajaan Gowa-Tallo di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin melawan VOC yang di pimpin Speelman dengan di bantu oleh Arung Palakka dari Bone berakhir dengan kemenangan di pihak VOC dan diakhiri dengan perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Sejak itu terjadi penyerahan Kerajaan Gowa pada pihak VOC dan disusul dengan kerajaan Wajo yang diserang tentara Bone dan VOC sehingga jatuhnya ibukota kerajaan Wajo yaitu Tosora. Arung Matoa to Sengeng gugur. Arung Matoa pengkatinya terpaksa harus menandatangani perjanjian di Makassar tentang penyerahan Kerajaan Wajo kepada VOC.

BENTUK-BENTUK PERJUANGAN ARUNG SINGKANG

Perjuangan dari Pasir Kembali ke Wajo

Pada tahun 1736, Arung Ta La Dallek datang ke kerajaan Pasir membawa surat kepada Arung Singkang untuk memanggil Arung Singkang kembali ke Wajo guna untuk membebaskan Wajo dari belunggu VOC dan sekutunya Bone. Arung Singkang merupakan satu-satunya tokoh pejuang dari Sulawesi Selatan yang tidak mau berkerja sama dengan VOC dan juga dapat mengalahkan armada VOC, walaupun cukup terlatih dan terkoordinir dengan baik tetapi kemenangan Arung Singkang dapat di raih karena adanya

motivasi dari budaya *Siri* dan *Pesse* (Desy Selviana, 2022 : 1).

Beberapa kawan-kawan seperjuangan La Maddukelleng, salah satunya Sultan Kutai Aji Muhammad Idris yang paling memahami pandangan dan tujuan La Maddukelleng, yaitu menghentikan dominasi kekuasaan orang-orang Barat, khususnya Belanda dan sekutu-sekutunya.

Ketika mayoritas pasukan Tellumpocoe menolak untuk ikut dalam perjuangan Arung Singkang kembali ke Sulawesi Selatan untuk membebaskan tanah airnya Wajo dari belunggu VOC, Cuma Sultan Kutai Aji Muhammad Idris yang bersedia ikut dalam perjuangannya. Sultan Kutai Aji Muhammad Indris sampai harus mengorbankan negaranya, Kutai dan meninggalkan anak, istri dan keluarga untuk pergi membantu mertuanya La Maddukelleng guna mengusir penjajah asing.

Setelah itu Arung Singkang mengumpulkan kekuatan persenjataan dan armada yang berkekuatan kapal jenis bintak yang berjumlah empat puluh kapal, kapal ini sengaja dipilih karena bisa cepat dan laju digerakkan. Kapal yang digunakan tersebut dilengkapi dengan meriam-meriam baru yang dibelinya dari orang-orang Inggris. Anggota pasukan La Maddukelleng dibagi atas dua kelompok, yaitu pasukan laut (marinir) yang dipimpin oleh La Banna To Assa (kapitang laut) dan pasukan darat dipimpin oleh Panglima Puanna Pabbola dan Panglima Cambang Balolo. Pasukan istimewa tersebut seluruhnya merupakan orang-orang terlatih dan sangat berpengalaman dalam pertempuran laut dan darat di Semenanjung Malaya dan perairan antara Johor dengan Sulawesi. Pasukan ini terdiri atas suku Bugis, Pasir, Kutai, Makassar serta Bugis-Pagatan (Civitasbook, 2023 : 2).

Armada Arung Singkang berangkat menuju Makassar melalui Mandar dan kemudian terlebih dahulu mampir di Pulau Sabutung. kedatangan Arung Singkang di Makassar tidak disambut sebagai tamu, karena tidak lama setelah kedatangannya mulai berkobarlah peperangan yang berlangsung cukup lama sampai akhir hayatnya. Dalam Desertasi Noorduyn dipaparkan bahwa dalam perjalanan menuju Makassar, dua kali armada

Arung Singkang diserang oleh armada Belanda yaitu pada tanggal 8 Maret 1734 dan 12 Maret 1734. Dalam catatan Raja Tallo diberitakan bahwa armada Belanda yang terdiri dari enam buah kapal perang dapat dipukul mundur, perang ini berlangsung selama dua hari (Civitasbook, 2023 : 2).

Lontarak Sukkuna Wajo (LSM) menyatakan bahwa ketika armada Arung Singkang sedang berlayar antara pulau Lae-lae dan Rotterdam, pasukan Belanda yang berada di Benteng tersebut menembaknya dengan meriam-meriam. Armada Arung Singkang membalas tembakan meriam itu dengan gencar. Gubernur Makassar, Johan Santijn (1733-1737) mengirim satu pasukan orang-orang Belanda yang ditemani oleh Ancak Baeda Kapitang Melayu menuju pulau Lae-lae. Hampir seluruh pasukan tersebut ditewaskan oleh Arung Singkang bersama pasukannya. Melalui pelabuhan Gowa dia diterima oleh kawan seperjuangannya I Mappasempek Daeng Mamaro, Karaeng Bontolangkasa yang sebelumnya sudah dikirim surat. Lalu kemudian Tumabbicara Butta (Mangkubumi) Kerajaan Gowa, I Megana juga datang menemui Arung Singkang. Kemudian diadakanlah pertemuan yang membicarakan rencana strategis dan taktik menghadapi tentara Belanda (Civitasbook, 2023 : 2).

Setelah armada VOC tidak dapat mengalahkan armada Arung Singkang, mereka melanjutkan pelayaran menuju Bone dan tiba di Ujung Palette. Ratu Bone We Bataru Toja, yang merangkap jabatan Datu Soppeng, sejak tahun 1667 menjadi sekutu Belanda, mengirim pasukan untuk menghadang armada La Maddukkelleng, dan menyampaikan bahwa topasalanna Bone (orang bersalah terhadap Bone) dilarang masuk melalui sungai Cenrana. Suruhan La Maddukkelleng menyampaikan balasan bahwa Arung Singkang, Sultan Pasir, menghormati raja perempuan dan tidak akan melalui sungai Cenrana, tetapi melalui Doping (wilayah Wajo) ke Singkang. Dalam Musyawarah dengan Arum Pone (merangkap Datu Soppeng), Arung Matowa Wajo mendapat tekanan dari Raja Bone untuk menyerang dan tidak memberi kesempatan masuk. Arung Matowa Wajo menjawab bahwa berdasarkan perjanjian pemerintahan di

Lapaddeppa antara Arung Saotanre La Tiringeng To Taba dengan rakyat Wajo (1476) yang berbunyi Wajo adalah negeri mereka dimana hak-hak asasi rakyat dijamin.

Dengan melalui proses negosiasi dan dengan persiapan yang mantap, Arung Singkang dengan pasukannya masuk melalui Doping. Tanggal 24 Mei 1736 ditambah dengan tambahan pasukan 100 (seratus) orang Wajo, sehingga diperkirakan kurang lebih 700 (tujuh ratus) orang ketika tiba di Sengkang. Karena Arung Singkang masih menghormati Hukum Adat Tellumpocoe (persekutuan antara Wajo, Soppeng dan Bone), dia berangkat ke Tosora untuk menghadiri persidangan dengan kawalan 1.000 orang. Tuduhan pun dibacakan yang isinya mengungkap tuduhan perbuatan Arung Singkang mulai dari sebab meninggalkan negeri Bugis sampai pertempuran yang dialaminya melawan Belanda. Arung Singkang lalu membela diri dengan alasan-alasan rasional dan menyadarkan akan posisi orang Bugis di hadapan Belanda. Karena demikian maka tidak mendapat tanggapan dari Majelis Pengadilan Tellumpocoe (Civitasbook, 2023 : 2).

Arung Singkang kemudian ke Peneki memangku jabatan Arung yang diwariskan ayahnya, namun dalam perjalanan tidak dapat dihindari terjadinya peperangan dengan kekalahan di pihak pasukan Bone. Arung Singkang dijuluki "Petta Pamaradekangi Wajona To Wajoe" yang artinya tuan/orang yang memerdekakan tanah Wajo dan rakyatnya. Karena La Salewangeng (pemangku Arung Matowa Wajo) usianya sudah cukup lanjut untuk menyelesaikan segala persoalan, maka melalui suatu mufakat Arung Ennengnge (Dewan Adat), beliau diangkat sebagai Arung Matowa Wajo XXXIV. Pengangkatannya di Paria pada hari Selasa tanggal 8 November 1736. Dalam pemerintahannya, tercatat berhasil menciptakan strategi pemerintahan yang cemerlang yang terus menerus melawan dominasi Belanda dan membebaskan Wajo dari penjajahan diktean Kerajaan Bone, juga keberhasilan memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Wajo.

Perjuangan Membebaskan Wajo

Perluasan pengakuan kekuasaan Belanda itu tidak sepi dari perlawanan-perlawanan yang kuat. Hal ini makin tampak setelah mangkatnya “sekutu” Belanda, Arung Palakka. Kemangkatan beliau digunakan oleh beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Belanda. Kerajaan Wajo melakukannya pada tahun 1710, dan dengan bantuan bajak-bajak laut, pasukan-pasukan kerajaan Wajo muncul di perairan Makassar, dan mendarat untuk kemudian bergerak sampai ke Maros. Penyerangan yang dilakukan ini gagal, dan pasukan kerajaan Wajo mengundurkan diri di arah lain (Balai Pustaka, 2009 : 214).

Armada La Maddukelleng mulai bergerak ke Makassar padabulan Februari 1736. Pertempuran dengan armada Belandaberlangsung dua kali. Sekitar dua bulan kemudian armada LaMaddukelleng mencoba merebut benteng Rotterdam diMakassar tetapi mengalami kegagalan. Sesudah itu ia membawapasukannya ke Wajo untuk mendirikan benteng pertahanan. Belandamengerahkan pasukannya dalam jumlah besar dengan bantuanpasukan Bone dan pasukan kerajaan-kerajaan lain yang proBelanda. Pertempuran besar terjadi di Wajo. Penduduk Wajomengangkat La Maddukelleng sebagai Arung Matoa Wajo.Perlawanan rakyat Wajo makin meningkat. Pasukan Bonemenghentikan perang dan mengadakan perjanjian damai denganArung Singkang. Setelah perdamaian dengan Bone terlaksana,Arung Singkang menggerakkan pasukannya ke Ujungpandang (J. B. Sudarmanto, 2007 : 346).

Kemudian, ketika La Maddukelleng menjadi Arung Matoa Wajo perlawanan itu dilanjutkan. Ia berhasil membangun kembali kekuatannya bersama dengan kerjaan Gowa yang berusaha mengusir Belanda dari Sulawesi Selatan. Usaha itu berhasil karena ketika itu Pabbicara Butta Gowa, yaitu La Maplasepe KaraEng Bontolangkasa, juga sangat tidak senang dengan kekuasaan Belanda di Bumi “tanah airnya”.

Pada bulan Mei 1739, Arung Singkang dibantu dengan sekutunya menyerang beberapa daerah kekuasaan Belanda di

Makassar, seperti kampung Maccini’ dan Maricayya. Arung Singkang juga menyerang Benteng Rotterdam namun tidak berhasil dan menuai kegagalan. Ketika penyerangan sedang dilakukan, orang-orang Bone yang bergabung dengan La Maddukelleng berbalik menentanginya. Kelompok orang Bone ini rupanya berhasil di pengaruhi oleh mantan permasuri Raja Bone, Batararitoja yang lari ke Makassar, dan mendapat perlindungan dari Belanda. Akibat kekalahannya itu, La Maddukelleng dan pasukannya memilih mundur dan kembali ke Wajo dan Belanda mengajak Arung Singkang untuk berdamai, namun ditolak. Setelahnya, pada tahun 1740 Belanda mengerahkan pasukan dalam jumlah yang besar untuk menyerang Wajo. Tiga bulan kemudian, tentaranya Kembali ke Makassar setelah mengalami pertempuran yang berat, cuaca buruk, dan berbagai wabah penyakit. Wajo telah mendapat hukuman tetapi tidak hancur. Arung Singkang segera menunjukkan kepada sekutu-sekutunya yang tidak ikut membantu dia melawan VOC bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar (M. C. Ricklefs, 2008 : 138). Pertempuran pun berkobar, Belanda menyerang Wajo dikarenakan ingin mengambil alih Tosora, ibu kota kerajaan Wajo, namun berhasil digagalkan. Belanda sekali lagi mengajak Arung Singkang untuk berdamai tetapi lagi-lagi ditolak. Setelah itu Belanda menghentikan serangannya. Dari kejadian itu, cita-cita untuk membebaskan Wajo dari kekuasaan Belanda dapat diwujudkan.

Arung Matoa Wajo Lamaddukelleng adalah seorang raja Wajo yang hampir seluruh pemerintahannya dipenuhi oleh usaha-usaha untuk mengusir Belanda dan sekutunya Bone dari bumi Sulawesi Selatan. Di samping itu, ia juga berusaha memperluas wilayahnya. Oleh karena itu, dia juga pernah menyerang kerajaan-kerajaan lainnya, seperti ke daerah Mandar. Akan tetapi usahanya tersebut tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh faktor internal, yang dimana Arung Singkang harus menghadapi saingan-saingan yang berusaha merebut kekuasaannya di Wajo, yang dimana konsekuensinya yaitu terjadinya perang saudara yang berlangsung dari tahun 1747 sampai 1751. Dan apalagi rakyatnya yang sudah merasa cukup terlibat dalam peperangan

yang tiada habisnya serta tidak bersedia membantu Arung Singkang dalam perang melawan Sidenreng.

Pada tahun 1754, Arung Singkang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Arung Matoa Wajo, namun dia tetap melanjutkan perang pribadinya melawan Bone sampai ia wafat pada tahun 1765. Penduduk Wajo memberinya gelar kehormatan Petta Pammadekaenggi Wajo (Tuan Yang Memerdekan Wajo). Pihak Belanda yang pada saat itu masih bersekutu dengan Bone tetap menguasai Makassar, tetapi tidak menjalankan pengaruh yang signifikan terhadap daerah Wajo sampai di akhir abad ke XIX.

Dampak Perjuangan Arung Singkang Terhadap Wajo

Perjuangan yang dilakukan selama tiga puluh tahun yaitu dari tahun 1735 sampai 1765 melibat seluruh masyarakat Wajo maupun sekutu dari Arung Singkang. Perjuangan yang dilakukan Arung Singkang telah memberikan semangat bagi masyarakat Wajo yang telah mengalami penindasan baik itu dalam kegiatan ekonomi maupun politik yang dilakukan oleh Belanda dan sekutunya Bone.

Perjuangan yang dilakukan Arung Singkang memberikan dampak bagi masyarakat Wajo. Dengan bersemangat masyarakat memberikan bantuan tenaga maupun harta benda untuk menegakkan kembali hak-hak kerajaan yang telah dibatasi oleh Belanda.

Keberanian Arung Singkang dalam mempertahankan Wajo dari serangan Belanda walaupun hanya dengan menggunakan persenjataan yang sederhana, telah membangkitkan keberanian bagi masyarakat untuk berjuang. Seandainya Arung Singkang hanya bergantung sepenuhnya kepada Belanda dalam mempertahankan kedudukannya pasti masyarakat tidak memberikan dukungan penuh pada perjuangannya. Masyarakat Wajo menyadari bahwa Arung Singkang adalah keturunan bangsawan Wajo dan merupakan penerus Sah raja Wajo. Dan dewan Wajo sudah mengetahui kemampuannya dan semangatnya didalam memperjuangkan hak-hak kerajaan Wajo. Apalagi sebelum menjadi Arung Matoa

Wajo, dia juga adalah seorang raja Pasir dari Kalimantan. Dan kemampuannya dalam memimpin armada laut sangat hebat dikarenakan dia sudah terlatih dalam perang laut sebab dulunya dia adalah seorang perompak.

Kembalinya Arung Singkang ke Sulawesi tidak disambut dengan baik, sehingga tidak lama setelah kedatangannya mulai berkobarlah peperangan yang berlangsung cukup lama. Dengan bantuan dari masyarakat Wajo dan para sekutunya, dia berhasil menguasai Wajo pada tahun 1737. Masyarakat bangga dengan keberhasilan yang dilakukan oleh Arung Singkang yang tidak pernah dilakukan oleh Arung Matoa sebelumnya.

Perjuangan Arung Singkang tidak semuanya menuai keberhasilan. Saat penyerangan ke Makassar, dia harus mengalami kekalahan dan harus mundur kembali ke Wajo. Belanda dan sekutunya Bone melancarkan serangan kepada Wajo untuk menguasai Tosora, ibu kota Wajo, namun berhasil digagalkan oleh Arung Singkang dan para sekutunya. Bersama dengan masyarakat Wajo dan sekutunya, mereka berhasil bertahan dari serangan Belanda. Pada akhirnya Belanda mengajukan perdamaian kepada Wajo, namun Arung Singkang menolaknya. Setelah itu Belanda menghentikan serangannya. Dari kejadian itu, cita-cita untuk membebaskan Wajo dari kekuasaan Belanda dapat diwujudkan.

Disamping itu Arung Singkang ingin melanjutkan serangannya ke beberapa kerajaan lainnya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Hal ini mengakibatkan masyarakat Wajo dan sekutu-sekutunya merasa lelah dan cukup sudah terlibat dengan peperangan dan ini membuat rasa kepercayaan masyarakat Wajo kepadanya hilang, maka hal itu membuat Arung Singkang harus berjuang sendiri. Pada tahun 1754, ia pun turun dari jabatannya sebagai Arung Matoa Wajo dan wafat pada tahun 1765. Namun Belanda dan sekutunya tidak menjalankan pengaruh yang signifikan atas daerah Wajo sampai akhir abad ke XIX.

Jadi perjuangan yang tidak dilandasi dengan rasa kepercayaan yang kuat membuat perjuangan itu menjadi sia-sia. Arung

Singkang yang pada awalnya mendapat dukungan dari masyarakat Wajo dan sekutu-sekutunya harus berakhir dengan penolakan dikarenakan ambisinya dalam memperluas kekuasaannya.

Simpulan

Setelah dipaparkan mengenai pembahasan skripsi yang berjudul “Perjuangan Arung Singkang dan Dominasi Kolonialisme (1726-1765)”, akan dipaparkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Wajo mulai muncul sekitar 1399, dan dikenal setelah La Tenribali dilantik sebagai raja I Cinnotabi. Pada masa pemerintahan Arung Cinnotabi V, gelar raja berubah menjadi Batara. Pada dua periode pemerintahan itu, sistem pemilihan Arung Matoa masih dilakukan secara turun temurun. Nama kerajaan ini diambil dari nama sebuah pohon besar yaitu bajok yang tumbuh dan rindang daunnya yang ada di sekitar Majauleng. Di bawah pohon inilah, rakyat Boli mengadakan perjanjian dengan La Tenribali sebelum diangkat menjadi Batara Wajo I. Sebelum kerajaan ini berdiri, telah didahului dengan lahirnya kerajaan lain yang berkaitan yaitu Kedatuan Cinnotabi dengan raja pertamanya bernama La Paukke. Ia kemudian digantikan oleh kerajaan kecil bernama Penrang. Kemudian Boli dibentuk oleh 3 orang bersaudara sepupu yang kemudian mengangkat La Tenribali menjadi raja pada Kerajaan Wajo.
2. Faktor-faktor Arung Singkang melakukan perjuangan dalam melawan Kolonialisme disebabkan oleh jatuhnya kerajaan Wajo ke tangan Belanda dan sekutunya Bone yang membuat masyarakat Wajo menjadi sengsara dan Belanda juga memonopoli perdagangan sehingga merugikan kerajaan Wajo. Selain itu, seperti apa yang diyakini dalam nilai siri' na pacce yang mana Arung Singkang mempertahankan harga diri walaupun harus dibayar dengan nyawa.
3. Bentuk perjuangan yang dilakukan Arung Singkang terhadap VOC adalah dengan menyatukan, dan mempersiapkan pasukan Wajo guna melakukan perlawanan, kemudian melakukan serangan terhadap VOC, Serangan ini digencarkan selama beberapa tahun. Arung Singkang akhirnya

berhasil mengusir VOC dan Bone dari Wajo. Arung Singkang yang berniat memperluas wilayahnya, namun tidak mendapat dukungan dari masyarakat Wajo dikarenakan masyarakat yang sudah lelah akan peperangan. Pada tahun 1754, Arung Singkang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Arung Matoa Wajo, namun dia tetap melanjutkan perang pribadinya melawan Bone sampai ia wafat pada tahun 1765.

DAFTAR PUSTAKA

- Civitasbook. (1998). *La Maddukelleng (Arung Matowa Wajo XXXIV, Arung Siengkang)*. URL: http://civitasbook.com/singo.php?cb=non&i=wall&id1=aaaaaaatamu&id2=&id3=aaaaavmp107_pahlawan. Diakses 18 mei 2023
- Djema, A., Siardin., Sabang, S. (2014). *Sejarah Perjuangan La Maddukelleng 1700-1765*. Makassar : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi.
- Duli, A. (2010). Peranan Tosora Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI-XIX. *Walennae: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan Dan Tenggara*. 12 (2): 143.
- Farid, A., Zainal. (2017). *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*, Makassar : CV. Social Politik Jenius.
- Firmansya, H. (2022). Perlawanan Sultan Hasanuddin Terhadap VOC 1660-1669 M. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Freely, J. (2019). *Muhammad al-Fatih: Sang Penakluk Konstantinopel*, (terjemahan Fahmi Yamani), Jakarta : PT Pustaka Alvabet.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto), Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Hafid, R. (2016). Budaya Politik Kerajaan Wajo. *Jurnal Sejarah dan Budaya*. 7 (2): 505.
- Hernadi, E. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia*, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.

- Kansil., Julianto. (1996). *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Kartodirdjo, S. (2014). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Lisyanti, H., Fika. (2021). Efek Musu Selleng Di Kerajaan Tallumpocoe (Bone, Soppeng, Wajo). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Noorduyn, J. *Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo' (An Eighteenth -Century Cronicle of Wajo')*. The Hague, 1955. 332 p. Text and translation of the one of the Buginese chronicles of Wajo', together with an introduction on the Buginese language and the history of Wajo'.
- Rahman. E. Yuliana. (2021). Sejarah Penyebaran Islam di Konfederasi Turatea Abad XVII (Tinjauan Sistem Pemerintahan dan Religi). *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol. 9, No. 1, DOI: Doi.org/10.21009/JPS.091.02
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (terjemahan Tim Serambi). Jakarta : Serambi.
- Setiawan, J. (2019). *Arung Palaka: Biografi dan Perjuangan dari Tanah Bugis*, Jawa Barat : CV Jejak.
- Soedarmanta, J. B. (2007). *Jejak-Jejak Pahlawan Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.